

PENGUATAN PENGGUNAAN WEBSITE SIGAP LAPOR DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI BAWASLU KOTA SURABAYA

Amelia Kartika Oktaviani¹, Hasan Ismail²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ameliakartika913@gmail.com, hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Bawaslu Kota Surabaya memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung fungsi pengawasan ini, website "SiGapLapor" diluncurkan sebagai platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara langsung. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat penggunaan SiGapLapor melalui kegiatan pendampingan kepada Bawaslu selama 40 hari. Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk memahami tantangan dan peluang dalam penggunaan platform tersebut. Selama pendampingan, mahasiswa magang membantu dalam pengelolaan laporan pelanggaran yang masuk, memverifikasi data, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai efektivitas penggunaan SiGapLapor. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa SiGapLapor berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penanganan laporan pelanggaran pemilu dan transparansi proses tersebut. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran meningkat, dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu juga mengalami peningkatan. Namun, penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini ke depan.

Kata kunci: SiGapLapor, Bawaslu, pemilu, transparansi, akuntabilitas

ABSTRACT

Bawaslu Surabaya plays a crucial role in ensuring fair, transparent, and accountable elections. To support this supervisory function, the "SiGapLapor" website was launched as a digital platform that allows the public to report alleged election violations directly. This community service project aims to strengthen the use of SiGapLapor through a 40-day mentorship program with Bawaslu. The activities were carried out through observation and interviews to understand the challenges and opportunities in using the platform. During the mentorship, the intern students assisted in managing incoming violation reports, verifying data, and raising public awareness and participation in the election supervision process. Mazmanian and Sabatier's policy implementation theory was used as an evaluative framework to assess the effectiveness of SiGapLapor's use. The results of this mentorship show that SiGapLapor significantly contributed to increasing the efficiency of handling election violation reports and enhancing transparency in the process. Public participation in reporting violations increased, and public trust in Bawaslu improved as well. However, strengthening technological infrastructure and enhancing the human resource capacity of Bawaslu is still needed to ensure the sustainability of this innovation in the future.

Keywords: *SiGapLapor, Bawaslu, election, transparency, accountability*

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan bebas dari kecurangan. Bawaslu Kota Surabaya, sebagai bagian dari lembaga pengawasan pemilu, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penanganan pelanggaran pemilu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Surabaya berfungsi

sebagai institusi pengawasan yang tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif dalam memberikan rekomendasi dan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, pelanggaran pemilu menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara tegas dan terbuka. Transparansi dan integritas merupakan salah satu cara agar kecurangan dan manipulasi tidak terjadi pada pemilihan umum. Bawaslu Kota Surabaya Untuk mencegah kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum, integritas dan transparansi adalah cara terbaik. BAWASLU Kota Surabaya adalah lembaga penyelenggara pengawasan pemilu yang dibentuk untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelanggaran terbagi atas 3 jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu. (Juwita et al., 2023)

Pentingnya transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilu terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Bawaslu dapat diakses dan dipantau oleh publik. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Akuntabilitas, di sisi lain, mengacu pada kewajiban Bawaslu untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik itu dalam bentuk pencegahan, penindakan, maupun rekomendasi sanksi. Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu. Salah satu langkah yang signifikan, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu upaya yang menonjol adalah penguatan penggunaan teknologi informasi melalui website SiGapLapor. Dengan memanfaatkan platform digital, Bawaslu Kota Surabaya mampu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pada website “SiGapLapor” dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu secara cepat dan efisien. Melalui platform ini, Bawaslu Kota Surabaya tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu di Bawaslu Kota Surabaya merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan ini berfokus pada pengabdian ini berguna bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat lingkungan yang sadar akan pentingnya dalam menjaga integritas pemilu semakin ditekankan melalui optimalisasi penggunaan teknologi. Website “SiGapLapor” hadir sebagai salah satu inovasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu. Apabila penggunaan website “SiGapLapor” oleh staff Bawaslu Kota Surabaya serta masyarakat sudah maksimal dan semakin meningkat sesuai dengan visi program untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, maka implementasi penguatan penggunaan “SiGapLapor” yang dilakukan selama pengabdian ini dapat dikatakan berhasil dalam memperkuat pengawasan pemilu di Kota Surabaya.

Pengabdian ini berfokus pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, dengan fokus pada penguatan penggunaan website “SiGapLapor” dalam penanganan pelanggaran pemilu. Penelitian ini mengarah pada implementasi kebijakan yang melibatkan efektivitas penerapan platform SiGapLapor sebagai sarana utama dalam pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilu, baik dari sisi internal Bawaslu maupun masyarakat pengguna layanan. Sasaran masyarakat dalam penelitian ini adalah pelapor baru, pelapor yang sudah pernah menggunakan “SiGapLapor”, serta pemantau pemilu dari berbagai kalangan. Tahap awal penelitian ini akan dilakukan dengan kunjungan pada subbagian Data dan Informasi (Datin) di Bawaslu Kota Surabaya untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait mekanisme pengelolaan dan operasional website “SiGapLapor”. Tahap selanjutnya adalah melihat efektivitas penerapan Sigaplpor dalam memfasilitasi pengaduan pelanggaran pemilu, mulai dari kemudahan akses hingga respon dan tindak lanjut atas laporan yang masuk. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada pendekatan implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, yang memiliki empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni variabel independen, variabel intervening, variabel di luar kebijakan, dan variabel dependen.

Implementasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana website SiGapLapor mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta mencegah pelanggaran lebih lanjut. Hasil implementasi nantinya akan dideskripsikan berdasarkan proposisi teoritis yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang digunakan. Metode implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier akan menjadi acuan dalam menilai keberhasilan implementasi SiGapLapor, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap proses penanganan pelanggaran yang lebih efisien dan terstruktur di Bawaslu Kota Surabaya.

METODE PELAKSANAAN

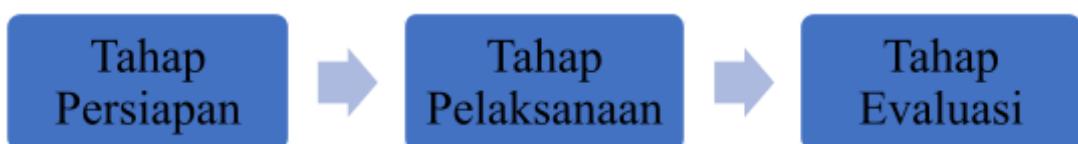
Dalam artikel ini, dilakukan kegiatan pendampingan selama 4 bulan yang dilaksanakan dari Bulan Juli hingga September 2024. Pengabdian ini merupakan wujud pengabdian yang dilakukan secara berkelompok oleh 3 mahasiswa yang memilih kelompok mereka sendiri dan melaksanakan program pengabdian di Bawaslu Kota Surabaya. Kegiatan Pengabdian mandiri ini adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penanganan pelanggaran pemilu secara langsung di lapangan. Pengabdian ini berfokus pada penguatan penggunaan website SiGapLapor dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Surabaya. Menangani pelanggaran pemilu, khususnya melalui pengecekan data yang diperoleh dari platform “SiGapLapor”, tanpa melibatkan langsung masyarakat. Proses pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, termasuk saksi, pelapor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa magang bekerja sama dengan petugas Bawaslu dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data pelanggaran, serta dalam memantau proses penanganannya. Adapun detail kegiatan yang telah dilaksanakan oleh penulis, diantaranya yaitu :

Keterangan Kegiatan Perbulan	Lokasi
Bulan Juli , mereview kelengkapan dokumen Undang-undang peraturan Bawaslu	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60299

Bulan Agustus , menghadiri rapat pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa pencalonan walikota dan wakil walikota Kota Surabaya Tahun 2024	Grand Swiss-Belhotel Darmo, Jl. Bintoro No. 21 60264 Surabaya
Bulan September , merekap jadwal kampanye pilkada 2024	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60299
Bulan Oktober , merekap jadwal kampanye pilkada 2024 dan membuat formulir Undang undang Perbawaslu terbaru	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60299

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Mahasiswa Magang Mandiri di Bawaslu Kota Surabaya

Pengabdian ini menggunakan metode observasi lapangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data yang merupakan target dari program penanganan pelanggaran pemilu yang telah tercantum pada laman website <https://sigaplapor.bawaslu.go.id/> wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Selain itu, mahasiswa juga melakukan observasi langsung terhadap proses penanganan pelanggaran, mulai dari tahap pelaporan hingga penyelesaian kasus, untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan baik. Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis berfokus pada upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Surabaya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penanganan pelanggaran pemilu diterapkan dengan baik dan terbuka, serta untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Penulis mengembangkan materi sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu, serta merancang strategi komunikasi yang efektif. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan dan pelaporan yang transparan dalam mendukung proses pemilu yang jujur dan adil. Berikut adalah alur metode pelaksanaan program penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu :

**Bagan 1.** Alur Metode Pelaksanaan sosialisasi penggunaan Website “SiGapLapor”

a) Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan, penulis membantu tim melakukan analisis kebutuhan untuk menemukan permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu. Berdasarkan analisis tersebut, rencana kegiatan disusun dengan menetapkan sasaran kegiatan, metode yang akan digunakan, dan timeline pelaksanaan. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk staf Bawaslu dan masyarakat yang terlibat, untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b) Tahapan Pelaksanaan:

Pada tahapan pelaksanaan, penulis membantu tim melakukan observasi langsung terhadap setiap tahapan penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kota Surabaya, mulai dari saat laporan diterima hingga saat kasus diselesaikan. Selain itu, tim melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelanggaran, seperti pelapor, terlapor, dan staf Bawaslu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tim juga mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan materi sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan pelanggaran pemilu serta peran aktif mereka dalam pengawasan. Di samping itu, strategi komunikasi yang efektif dirancang untuk memperkuat interaksi antara Bawaslu dan masyarakat.

c) Tahapan Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, penulis membantu tim melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan untuk menilai efektivitas metode yang telah diterapkan. Evaluasi mencakup umpan balik dari Bawaslu dan masyarakat mengenai keberhasilan program pendampingan serta area yang perlu ditingkatkan. Seluruh hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk Laporan yang disusun secara sistematis menyimpan semua hasil kegiatan dan diserahkan kepada Bawaslu sebagai rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. Dari hasil kegiatan penguatan penggunaan website SiGapLapor tersebut dapat meningkatkan pengawasan pemilu seperti yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Surabaya, upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga peraturan-peraturan lain yang relevan, termasuk kebijakan internal Bawaslu yang disesuaikan dengan konteks lokal Surabaya.



Gambar 1. Kegiatan Pengolahan Website SiGapLapor Bawaslu Kota Surabaya

Selama program pendampingan, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berfokus pada pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Salah satu kegiatan utama adalah penerapan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, di mana penulis bersama staf Bawaslu subbagian PP, PS, hukum dan datin secara aktif mengecek dan memverifikasi laporan yang masuk melalui website

“SiGapLapor”. Website ini digunakan untuk memantau dan menangani aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu, sehingga memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan akurat sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan program penguatan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh penulis, berikut rincian data yang diolah oleh penulis :

N O	KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	
		REGIST RASI	TIDAK DIREGIST RASI	REGIST RASI	TIDAK DIREGIST RASI	PELANGG ARAN	BUKAN PELANGG ARAN
1	KOTA SURAB AYA	2	0	12	14	4	24
	JUMLA H	2	0	12	14	4	24

Tabel 2. Hasil penindakan laporan kecurangan dalam pemilu

JENIS PELANGGARAN							
ADMINISTRATIF		ADM CEPAT	ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN		
ADMINISTRATIF	ADM CEPAT				NETRALITAS ASN	UU LAIN	
9	10		1	12	13	4	
0	0			0	0	0	
0	0			0	0	0	

Tabel 3. Hasil penindakan laporan kecurangan dalam pemilu

Dari tabel penyajian data diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa jenis pelanggaran dalam pemilu pertam yakni ditemukan pelanggaran ADM Cepat dimana ditemukan 10 pelanggaran. Kedua ada pelanggaran Kode etik terdapat 11 pelanggaran, Ketiga Hukum lain terbagi menjadi dua bagian yakni Netralitas ASN dan UU lainnya hal ini diterangkan diatas ada sebanyak 27 pelanggaran di bagian Hukum lain. Semua data diatas diperoleh dari pelaporan masyarakat yang masuk dari SiGapLapor dan diolah oleh staff bagian PP, PS, Hukum, dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya (Bawaslu).

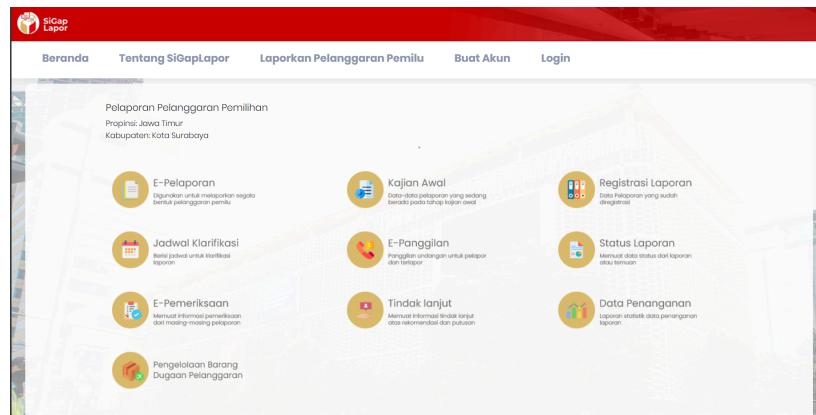
Program pendampingan ini juga mengadopsi Implementasi Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu. Di Instansi Bawaslu terdapat inovasi berupa website yang disebut dengan “SiGaplapor,” yaitu penanganan pelanggaran pemilu yang diterapkan dalam konteks peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan, investigasi, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu serta mempercepat respons dari pihak berwenang untuk

menindaklanjuti laporan tersebut. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan mekanisme pelaporan yang transparan, “SiGapLapor” berupaya menciptakan proses pengawasan pemilu yang lebih efektif dan akuntabel. Melalui pendekatan ini, penulis bersama tim mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses penanganan pelanggaran.



Gambar 2. Gambar beranda website SiGapLapor

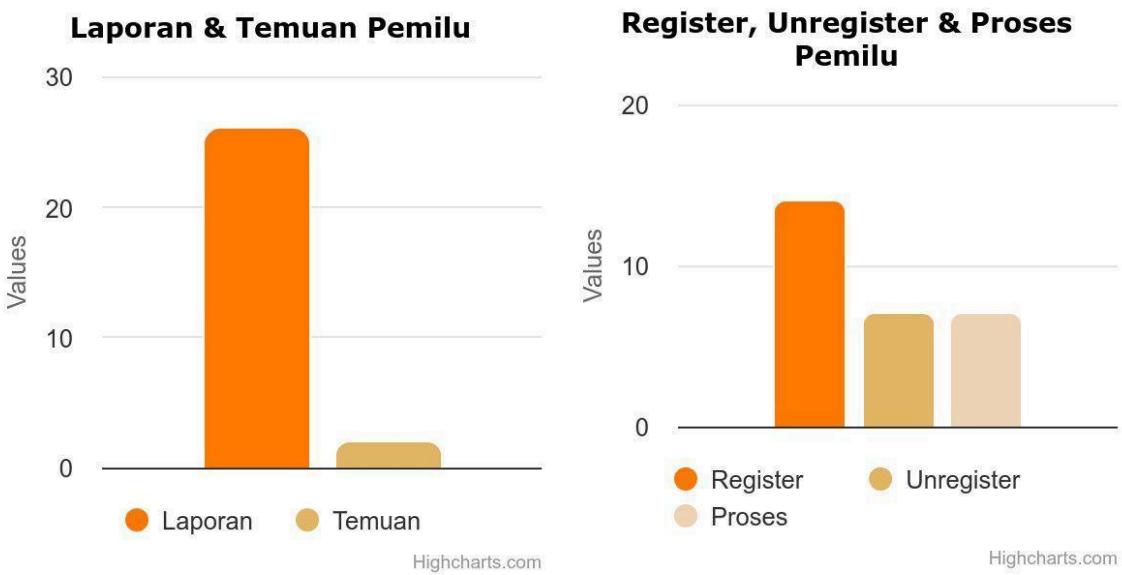
Program penguatan penanganan pelanggaran pemilu yang telah dilaksanakan oleh penulis selama masa pendampingan di Bawaslu Kota Surabaya berjalan dengan efektif. Masyarakat semakin menyadari pentingnya memahami pelanggaran pemilu dan bagaimana cara melaporkannya melalui platform “SiGapLapor”.



Gambar 3. Gambar menu pelaporan website SiGapLapor

Penulis bersama tim melakukan Pengecekan langsung ke website “SiGapLapor”, untuk melihat berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Selain itu, pelatihan internal bagi staf Bawaslu Kota Surabaya juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk melalui website “SiGapLapor” dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan kecepatan penanganan laporan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan

publik terhadap Bawaslu Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel.



Gambar 4. Tampilan hasil pengolahan data selama pelaporan proses pemilu tahun 2024 (Sumber data : SiGapLapor.bawaslu.go.id)

Dari analisis data pada Gambar 4 menunjukkan bahwa implementasi website *SiGapLapor* oleh Bawaslu Kota Surabaya berhasil memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu. Data statistik yang ditampilkan mencerminkan peningkatan efisiensi dalam proses registrasi dan penanganan laporan pelanggaran, dengan perbedaan yang jelas antara laporan yang teregistrasi dan tidak teregistrasi serta klasifikasi hasil penanganan. Penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran secara cepat dan tepat waktu, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan pemilu. Dengan demikian, inovasi digital ini berkontribusi signifikan terhadap upaya Bawaslu dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, meskipun keberhasilan penuh dari implementasi ini tetap bergantung pada dukungan politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Dalam artikel ini penulis melakukan analisis implementasi menggunakan teori yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier, dalam “Implementation and Public Policy” (1983) sering digunakan dalam kajian implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu seperti yang terjadi di Bawaslu Kota Surabaya. Teori ini membantu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan saat diimplementasikan, dan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dalam proses implementasi. (Purwanti et al., 2019)

Penulis melakukan wawancara dengan staff bawaslu tentang bagaimana implementasi kebijakan inovasi penggunaan website dalam melakukan penanganan dan pelaporan kecurangan dalam pemilu. Untuk menganalisis penerapan implementasi kebijakan “Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kota Surabaya” apakah sudah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu. Dalam artikel

ini penulis menganalisis kebijakan tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Dalam pelaksanaan implementasi program SiGapLapor sebagai platform pengaduan pelanggaran pemilu bagi masyarakat. Kesiapan teknologi adalah faktor utama dalam implementasi secara keseluruhan Bawaslu se-indonesia. Hal ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung operasional atau berjalannya system SiGapLapor. Kapasitas SDM juga sangat mempengaruhi dalam proses implementasi sebagaimana staff Bawaslu Kota Surabaya sebagai operator. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM Dari segi kapasitas untuk memastikan pengoperasian Platrform dengan benar. Petunjuk teknis dalam penyediaan penggunaan SiGapLapor juga menjadi salah satu kesulitan. Dimana Petunjuk ini penting untuk memastikan kelancaran semua pengguna memahami cara menggunakan platfrom dengan benar. Dukungan Sarana juga penting selain teknologi dan SDM, dukungan sarana lain seperti infrastruktur jaringan dan akses internet yang stabil juga diperlukan untuk memastikan operasional SiGapLapor. Ruang Lingkup perubahan perilaku yang diinggank dari penerapan atau implementasi kebijakan penggunaan SiGapLapor ini adalah Dimana masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor bawaslu terdekat dan membuat banyak antrian untuk melakukan pengaduan pelanggaran kecurangan dalam pemilu. Dan harapan terbesar dari Bawaslu Kota Surabaya ialah dengan adanya fasilitas ini dapat meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Surabaya serta dalam melakukan pelaporan tidak melalui proses yang berbelit. Hal ini membuat motivasi agar meningkatkan peduli masyarakat terhadap kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di sekitar msayarakat.

Kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program SiGapLapor. Bawaslu Kota Surabaya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pengaduan yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Kebijakan ini dipetakan dengan beberapa langkah utama, seperti penyediaan teknologi yang mendukung, pelatihan SDM, dan pengaktifan Panwascam di setiap kecamatan untuk membantu masyarakat mengakses platform digital ini. Struktur kebijakan ini berfokus pada memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu secara daring, tanpa perlu datang ke kantor Bawaslu, serta memastikan adanya akses internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, tantangan terbesar dalam menstrukturkan implementasi adalah memastikan semua pihak yang terlibat memahami kebijakan ini secara jelas dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya secara konsisten. Petunjuk teknis yang komprehensif dan program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa staf Bawaslu dan Panwascam dapat berfungsi secara efektif. Dengan adanya struktur kebijakan yang jelas, kesiapan teknologi, dan dukungan infrastruktur yang baik, program SiGapLapor diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dari analisis implementasi diatas bisa disimpulkan bahwa penerapan website “SiGapLapor” sesuai dengan tujuan awal pembuatannya, yaitu untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu. Melalui inovasi ini, proses pelaporan menjadi lebih efisien, partisipasi masyarakat meningkat, dan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Namun, kesuksesan penuh dari implementasi ini juga sangat bergantung pada dukungan politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bawaslu Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dengan implementasi website "SiGapLapor". Platform digital ini memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara cepat dan efisien. Dengan website ini, partisipasi publik dalam pengawasan pemilu meningkat, dan proses penanganan laporan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, kehadiran mahasiswa magang di Bawaslu juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pengawasan lapangan, mempercepat verifikasi laporan, serta mendampingi proses penanganan pelanggaran. Program ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan efisiensi internal Bawaslu, tetapi juga berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Inovasi ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan penggunaan teknologi untuk mendukung proses pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Untuk memperkuat keberlanjutan program ini, Bawaslu Kota Surabaya sebaiknya terus memperluas literasi digital masyarakat, terutama di daerah dengan akses teknologi terbatas. Hal ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Peningkatan kapasitas staf Bawaslu melalui pelatihan rutin mengenai penggunaan website "SiGapLapor" juga perlu dilaksanakan guna memastikan penanganan laporan berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat. Lebih lanjut, dukungan dari aspek politik dan kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan efektivitas inovasi ini. Pengembangan infrastruktur teknologi juga harus menjadi prioritas agar platform digital ini dapat berfungsi optimal di seluruh wilayah. Dengan kombinasi dukungan politik, kebijakan, serta infrastruktur yang memadai, Bawaslu akan mampu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang, menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Juwita, Soultan Joefrian, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15(3), 445–453.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Juwita, Soultan Joefrian, M., Rusta, A., Irawati, & Fajri, M. (2023). Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15(3), 445–453.
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- <https://sigaplpor.bawaslu.go.id/>